KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN

2 OKTOBER- 9 OKTOBER 2026



085 - 169 - 767 - 212
@pemasyarakatanjogja

SAMBUTAN KAKANWIL



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dapat menyusun laporan kegiatan ini. Publikasi ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan, sekaligus menjadi sarana informasi mengenai berbagai program, kegiatan, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Seluruh kegiatan yang tersaji dalam laporan ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pembinaan warga binaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.



Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Kanwil Ditjenpas DIY secara menyeluruh, menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin maju, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

M. ALI SYEH BANNA

KANWIL DITJENPAS DIY GELAR SIDAK, PASTIKAN SELURUH UPT TANPA DISKRIMINASI

Yogyakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar inspeksi mendadak (sidak) serentak pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah DIY, Minggu malam (4/10). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pengawasan langsung untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.

Sidak dilaksanakan oleh jajaran Kanwil Ditjenpas DIY dengan menyambangi seluruh UPT Pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta. Pemeriksaan mencakup kondisi keamanan dan ketertiban, kesiapsiagaan petugas, serta pelaksanaan pelayanan terhadap warga binaan.

Selain aspek pengamanan, jajaran Kanwil juga memastikan tidak terdapat perlakuan berbeda atau diskriminasi dalam pemberian layanan dan pemenuhan hak warga binaan. Setiap warga binaan harus memperoleh hak dan pelayanan sesuai ketentuan tanpa membedakan latar belakang, status, maupun kondisi masing-masing.

Hasil sidak menunjukkan kondisi seluruh UPT yang dikunjungi dalam keadaan aman dan terkendali. Petugas pengamanan berada dalam kondisi siap melaksanakan tugas, sementara pelayanan dan pemenuhan hak warga binaan tetap berjalan. Jajaran Kanwil juga memberikan penguatan kepada petugas agar konsisten menjaga integritas serta memberikan pelayanan secara adil dan profesional.

Sidak ini menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan Kanwil Ditjenpas DIY untuk memastikan standar keamanan dan pelayanan diterapkan secara konsisten di seluruh UPT. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya menjaga UPT tetap aman, tertib, serta memastikan seluruh warga binaan mendapatkan hak dan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi.


Sidak Lapas Wonosari


Sidak LPP Jogja

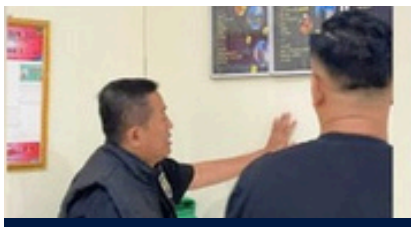
Sidak LPKA Jogja


Sidak Rutan Jogja


Sidak Rutan Bantul



Sidak Lapas Wirogunan


Sidak Lapas Sleman


Sidak LPN Jogja


Sidak Rutan Wates

KANWIL DITJENPAS DIY DORONG TERTIB ADMINISTRASI DAN DISIPLIN PEGAWAI LEWAT PELATIHAN MANAJEMEN ASN DI LPP YOGYAKARTA



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme aparatur pemasyarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan In House Training Manajemen ASN yang berlangsung di Aula Atas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta pada Senin (5/10).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala LPP Kelas IIB Yogyakarta, Mardiati Ningsih, dan dihadiri oleh jajaran pegawai setempat. Pelatihan ini menghadirkan tim narasumber dari Kanwil Ditjenpas DIY yang memaparkan materi strategis, mulai dari tata kelola kenaikan pangkat dan angka kredit jabatan fungsional oleh Fibriarinni, penegakan disiplin pegawai oleh Harum Tri Laksono, hingga teknik peremajaan data aplikasi kepegawaian oleh Johan Mualimin.

Ruang lingkup pelatihan dirancang secara komprehensif mencakup kebijakan tata kelola SDM, pencegahan pelanggaran disiplin dan kode etik, hingga evaluasi kinerja pegawai. Tidak hanya menyajikan teori, kegiatan ini juga membekali peserta dengan simulasi dan praktik langsung peremajaan data mandiri pada aplikasi MyASN, Star ASN, dan Simwaipas, serta penyusunan angka kredit jabatan fungsional.

Guna memastikan efektivitas materi, seluruh peserta mengikuti setiap sesi secara interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan pendampingan teknis. Sesi ini dimanfaatkan secara optimal oleh para pegawai untuk mengonsultasikan kendala administratif maupun tata kelola kepegawaian di lapangan.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas DIY, Kristiana Hambawani, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Melalui pembekalan berkelanjutan ini, Kanwil Ditjenpas DIY berharap jajaran LPP Yogyakarta semakin tertib administrasi, menjunjung tinggi disiplin kerja, serta mampu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT KAPASITAS PENGELOLA ARSIP LEWAT IDENTIFIKASI MEMORI KOLEKTIF BANGSA





YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian warisan dokumenter bernilai sejarah tinggi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil Ditjenpas DIY dalam rapat identifikasi dan pemetaan arsip berpotensi Memori Kolektif Bangsa (MKB) yang digelar secara virtual dari Ruang Kerja Bagian Umum Lantai 3, Selasa (06/10).

Kegiatan strategis ini diikuti oleh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), para Arsiparis, serta pengelola arsip di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan DIY. Agenda utama pertemuan ini berfokus pada langkah awal mengidentifikasi dan memetakan arsip-arsip bernilai sejarah penting di lingkungan kementerian agar dapat diregistrasikan secara resmi sebagai bagian dari Memori Kolektif Bangsa.

Program pendaftaran Memori Kolektif Bangsa (MKB) yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjenpas DIY memiliki arti penting sebagai langkah awal untuk menominasikan arsip bersejarah ke ajang Memory of the World (MOW) UNESCO di tingkat regional maupun global.

Melalui kegiatan yang menghadirkan narasumber untuk memberikan pembekalan teknis kriteria, prosedur registrasi, dan penyusunan narasi historis ini, para pengelola arsip diharapkan mampu mengenali dokumen penting yang layak dilestarikan.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas DIY, Kristiana Hambawani, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan berjalan lancar dan interaktif, serta menegaskan kesiapan instansi dalam menginventarisasi dokumen bernilai sejarah guna menjaga memori kolektif bangsa dan memperkuat identitas kebudayaan Indonesia di dunia internasional.

KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI ZOOM MENTERI PERKUAT REHABILITASI WBP

YOGYAKARTA – Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara daring melalui Zoom, di Aula Semar Wicaksana Lantai 1, Selasa (6/10).



Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi bagi WBP melalui koordinasi dan evaluasi program pemasyarakatan. Rapat juga menjadi wadah untuk membahas tindak lanjut pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi serta memastikan pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Agus Andrianto, menekankan pentingnya peran Kepala Kantor Wilayah dan jajaran UPT dalam memastikan program rehabilitasi dan reedukasi bagi WBP dapat terlaksana dengan baik.

"Arahkan kepada UPT bahwa Kakanwil juga bertanggung jawab dalam rehabilitasi dan reedukasi bagi Warga Binaan. Kita juga harus menggandeng klinik maupun tempat atau fasilitas layanan kesehatan yang lain," ujar Agus.

Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Ditjenpas DIY terus mendorong penguatan program rehabilitasi dan reedukasi di lingkungan pemasyarakatan. Koordinasi antarpihak dilakukan untuk memastikan setiap program dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan memberikan manfaat bagi proses pembinaan WBP.

Kanwil Ditjenpas DIY berharap pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi dapat terlaksana secara optimal dengan dukungan seluruh jajaran serta mitra terkait. Penguatan program tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembinaan dan mempersiapkan WBP agar mampu kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat.



EVALUASI JADI AKSI, KAKANWIL DITJENPAS DIY DORONG KINERJA MAKIN BERINTEGRITAS

YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-DIY, Selasa (6/10).

Kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut atas hasil Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Kementerian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Mengangkat tema "Evaluasi Menjadi Aksi, Mewujudkan Kinerja Kemenimipas yang Berkualitas dan Berintegritas", kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat langkah jajaran Pemasyarakatan DIY dalam menghadapi penghujung tahun anggaran 2026.

Dalam arahannya, Ali Syeh Banna menyampaikan sejumlah hasil dan arahan Rakor tingkat Kementerian yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran. Setiap UPT didorong untuk melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala, serta segera mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh target dapat diselesaikan secara optimal.

"Evaluasi tidak boleh berhenti menjadi catatan. Evaluasi harus menjadi aksi, sehingga setiap kekurangan dapat segera diperbaiki dan setiap target dapat diselesaikan," tegas Ali dalam arahannya.

Selain pencapaian kinerja, integritas jajaran juga menjadi perhatian utama. Kakanwil menekankan agar seluruh Kepala UPT terus memperkuat pengawasan dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan serta menjunjung tinggi integritas.

Dengan evaluasi yang dilanjutkan melalui aksi nyata, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan tugas sekaligus mewujudkan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas.

KABAG TUM KANWIL DITJENPAS DIY SOSIALISASIKAN INOVASI KEPEGAWAIN



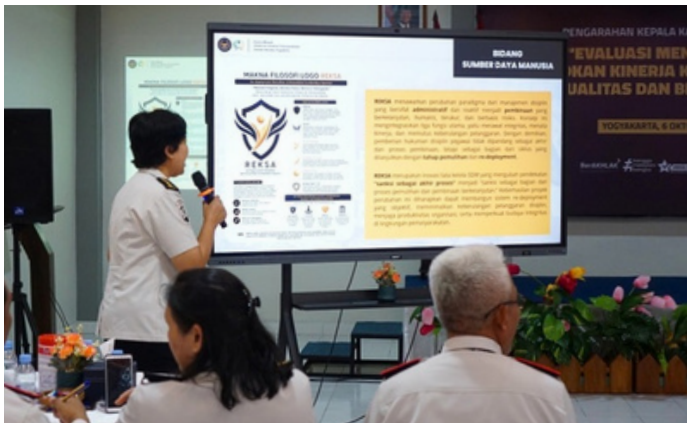

Yogyakarta - Penegakan disiplin tidak hanya berbicara tentang pemberian sanksi, tetapi juga bagaimana organisasi memberikan ruang bagi pegawai untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi. Semangat tersebut menjadi dasar lahirnya inovasi REKSA (Re-deployment, Pemulihan, dan Konsolidasi Sumber Daya Aparatur) yang diperkenalkan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-DIY.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) DIY, Kristiana Hambawani, selaku pencetus inovasi REKSA, melaksanakan sosialisasi aplikasi tersebut kepada seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-DIY, Selasa (6/10), bertempat di Aula Kanwil Ditjenpas DIY.

REKSA merupakan inovasi yang dirancang sebagai salah satu bentuk pembinaan bagi pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin.

Inovasi ini hadir untuk mendukung proses pemulihan budaya kerja sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap terulangnya perilaku indisipliner. Melalui REKSA, hukuman tetap ditempatkan sebagai instrumen penting dalam penegakan disiplin dan kepastian hukum. Namun, ketika masa hukuman telah selesai dijalani, proses pembinaan tidak berhenti begitu saja.

Melalui aplikasi dan mekanisme yang dikembangkan dalam REKSA, proses penanganan pegawai pasca-hukuman disiplin diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, objektif, humanis, dan berbasis risiko. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berorientasi pada kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga pada bagaimana pegawai dapat kembali membangun kepercayaan dan menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Melalui pembinaan yang tepat, setiap pegawai tetap memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali menjadi bagian penting dalam mewujudkan organisasi Pemasyarakatan yang semakin berintegritas.

KANWIL DITJENPAS DIY VERIFIKASI PELAYANAN PUBLIK BAPAS YOGYAKARTA



YOGYAKARTA -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendampingi pelaksanaan koordinasi dan verifikasi lapangan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Tim Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta, Rabu (7/10).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan publik pada satuan kerja pemasyarakatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu memberikan pelayanan yang mudah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Dalam verifikasi lapangan tersebut, Tim Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan melakukan pengecekan terhadap sejumlah aspek pelayanan publik, meliputi sarana dan prasarana pelayanan, informasi dan standar pelayanan, mekanisme pengaduan, maklumat pelayanan, serta aspek pendukung lainnya.

Verifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara standar pelayanan dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam rangka penguatan kualitas pelayanan publik.

Kanwil Ditjenpas DIY turut mendukung pelaksanaan kegiatan dengan melakukan koordinasi bersama jajaran Bapas Kelas I Yogyakarta serta memastikan tindak lanjut terhadap hasil verifikasi dapat dilaksanakan secara optimal. Melalui kegiatan ini, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di Bapas Kelas I Yogyakarta semakin profesional, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.



KANWIL DITJENPAS DIY DAMPINGI ASESMEN SERENTAK WARGA BINAAN DI LAPAS NARKOTIKA YOGYAKARTA





YOGYAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendampingi pelaksanaan kegiatan Asesmen Serentak dalam Rangka Rehabilitasi dan Re-Edukasi Nasional di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Rabu (7/10).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Re-Edukasi bagi Warga Binaan yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara daring pada Selasa, 6 Oktober 2026. Pelaksanaan asesmen ini menjadi langkah awal pemetaan kondisi dan kebutuhan warga binaan untuk mendukung program rehabilitasi yang tepat dan terarah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan Supervisor dan Asesor Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Kanwil Ditjenpas DIY, Bapas Kelas I Yogyakarta, dan Bapas Kelas II Wonosari. Sebanyak 154 orang warga binaan mengikuti proses asesmen ini untuk memperoleh gambaran mengenai potensi, kebutuhan, serta faktor-faktor pertimbangan dalam penentuan program pembinaan.

Berdasarkan hasil asesmen, sebanyak 57 orang warga binaan dinyatakan memenuhi syarat, sementara 97 orang lainnya belum memenuhi syarat. Data dan informasi yang diperoleh dari asesmen ini akan digunakan sebagai dasar pemetaan dalam merumuskan bentuk intervensi yang sesuai, mulai dari proses pemulihan, perubahan perilaku, peningkatan kapasitas diri, hingga persiapan reintegrasi sosial.

Kegiatan ini sekaligus mencerminkan sinergi yang kuat antara Kanwil Ditjenpas DIY, Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Bapas Kelas I Yogyakarta, dan Bapas Kelas II Wonosari dalam mengimplementasikan program rehabilitasi dan re-edukasi nasional secara optimal, aman, dan tertib.

KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI SOSIALISASI PERUBAHAN POSTUR ANGGARAN TA 2027 SECARA DARING



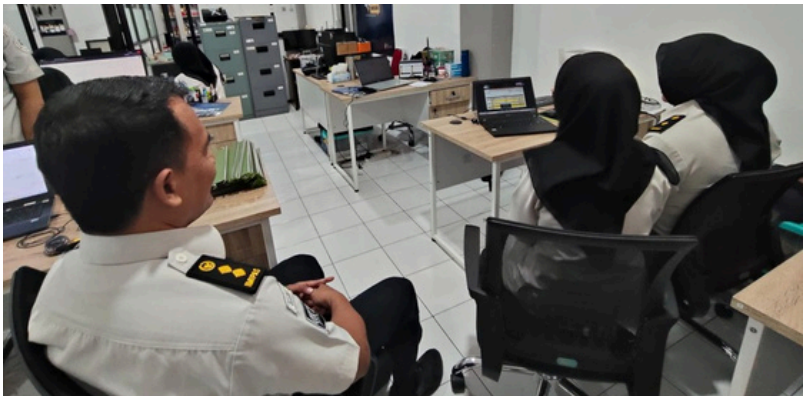

YOGYAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti kegiatan Sosialisasi Perubahan Postur Anggaran Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara daring, Rabu (7/10).

Kegiatan yang diikuti oleh Tim Perencanaan dan Reformasi Birokrasi dari Ruang Rapat Lantai II Kanwil Ditjenpas DIY ini merujuk pada Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.1-PR.01.07-20 tanggal 6 Oktober 2026. Pelaksanaan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam perencanaan serta penganggaran, baik di tingkat Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), agar penyusunan anggaran berjalan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan dan prioritas pemasyarakatan.

Acara yang dibuka dengan pemaparan materi mengenai strategi penyusunan anggaran tahun 2027 yang memiliki kesesuaian dengan pola tahun 2026 ini juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif sebelum ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Melalui kegiatan ini, Tim Perencanaan dan Reformasi Birokrasi Kanwil Ditjenpas DIY diharapkan dapat lebih memahami postur anggaran tahun 2027 serta mengimplementasikannya secara optimal dalam penyusunan pagu alokasi anggaran mendatang. Rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan aman.

KANWIL DITJENPAS DIY LAKSANAKAN PENGUMPULAN DATA KEBIJAKAN DI BAPAS YOGYAKARTA UNTUK PENGUATAN LAYANAN PEMASYARAKATAN





Yogyakarta — Tim Analis Kebijakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengumpulan data awal analisis dan evaluasi kebijakan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Yogyakarta, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan ini melibatkan Analis Kebijakan Ahli Madya, Analis Kebijakan Ahli Pertama, serta Kepala dan pejabat manajerial Bapas Yogyakarta guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok serta fungsi pemasyarakatan di wilayah DIY.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pegawai UPT dan survei kuesioner untuk memetakan implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala operasional, serta menyusun rekomendasi strategis bagi pimpinan berdasarkan data tingkat pengetahuan pegawai, kendala implementasi, dan usulan dari lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, teridentifikasi sejumlah masukan penting yang mencakup berbagai aspek operasional dan kebijakan, seperti perlunya analisis kebutuhan SDM dan pemetaan beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyambut implementasi KUHP baru, penguatan posisi strategis Bapas sebagai instrumen reintegrasi sosial, serta pedoman yang lebih jelas mengenai pelibatan korban dalam penyusunan Litmas untuk perkara sensitif.

Selain itu, dibahas pula perlunya masa transisi atau untuk kebijakan baru, harmonisasi penyelesaian perkara anak, dukungan manajemen bagi Griya Abhipraya, pengelolaan beban tugas kehumasan, hingga penguatan Pos Bapas Kulon Progo.

Sebagai rencana tindak lanjut, seluruh data yang diperoleh dari rangkaian kunjungan ke UPT ini akan diinventarisir dan diperingkat menjadi tiga prioritas utama untuk dikaji lebih mendalam oleh tim.

WUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL, BAPAS YOGYAKARTA GANDENG BERBAGAI PIHAK BENTUK KELAYAN BINTER





YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Ali Syeh Banna, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) Desa Reintegrasi Sosial Bapas Kelas I Yogyakarta, Kamis (8/10).

Kegiatan yang berlangsung di Grand Keisha Hotel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lintas sektor dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.

Pembentukan Kelayan Binter sendiri mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-01.PK.04.02 Tahun 2026 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi pada Balai Pemasyarakatan.

Ali, selaku perwakilan Pemasyarakatan, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) Desa Reintegrasi Sosial oleh Bapas Kelas I Yogyakarta di Godean.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa tujuan akhir pemasyarakatan bukan sekadar pembinaan di dalam lapas atau rutan, melainkan keberhasilan reintegrasi sosial agar mantan narapidana dapat mandiri, produktif, diterima kembali oleh masyarakat, serta tidak mengulangi pelanggaran hukum.

Keberhasilan ini memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah hingga kalurahan, TNI-Polri, Bapas, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta mendukung pengawasan dan pendampingan klien secara berkelanjutan.

KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT TATA KELOLA KEARSIPAN MELALUI BIMTEK DAN SOSIALISASI



Yogyakarta — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Tata Kelola Kearsipan pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (8/10). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran dalam mengelola arsip secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku.

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pengelola dan petugas yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam bidang kearsipan pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari tata kelola administrasi pemerintahan sekaligus mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengelolaan arsip yang dilakukan secara tepat menjadi penting untuk memastikan setiap dokumen kedinasan dapat tersimpan dengan baik, mudah ditemukan ketika dibutuhkan, serta memiliki kejelasan status dan nilai guna.

Selain aspek teknis, kegiatan Bimtek dan Sosialisasi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran jajaran bahwa arsip merupakan bagian penting dari memori dan bukti pelaksanaan kegiatan organisasi. Penataan arsip yang baik dapat mendukung efektivitas pelayanan administrasi, memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan, serta meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen penting.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola kearsipan di lingkungan satuan kerja. Setiap jajaran didorong untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga pengelolaan arsip dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, aman, dan akuntabel.

Dengan pengelolaan kearsipan yang semakin baik, diharapkan tercipta sistem administrasi pemerintahan yang lebih profesional dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan. Bimtek dan Sosialisasi ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan informasi dan arsip yang terintegrasi dan sesuai ketentuan.





BIMTEK DUTA KERJA SAMA DAN APLIKASI SIKAP, KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT SINERGI DAN TATA KELOLA KERJA SAMA

YOGYAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Duta Kerja Sama dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama (Dittikers) pada Kamis (8/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas jajaran dalam membangun, mengelola, serta mendokumentasikan kerja sama secara lebih efektif dan terintegrasi.

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Kanwil Ditjenpas DIY dan perwakilan UPT Pemasyarakatan se-DIY sebagai bagian dari penguatan peran Duta Kerja Sama di lingkungan pemasyarakatan. Melalui Bimtek ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan kerja sama, mulai dari proses identifikasi mitra, penyusunan dan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, hingga evaluasi dan pelaporan. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya kerja sama yang lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Selain penguatan peran Duta Kerja Sama, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai penggunaan aplikasi SIKAP sebagai sarana pendukung pengelolaan data dan informasi kerja sama. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola administrasi kerja sama yang lebih tertib, akurat, transparan, dan mudah dipantau. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, berbagai informasi terkait kerja sama dapat terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Melalui kegiatan Bimtek ini, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen untuk mengoptimalkan peran Duta Kerja Sama sebagai penggerak dan penghubung dalam membangun jejaring kolaborasi. Implementasi aplikasi SIKAP juga diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kerja sama secara profesional dan berbasis data. Dengan sinergi yang semakin kuat dan tata kelola kerja sama yang semakin baik, jajaran Kanwil Ditjenpas DIY terus mendorong kolaborasi yang berdampak bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

SIAP BEBAS PUNGLI, PEMASYARAKATAN DIY PERTAJAM LAYANAN PUBLIK



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik Pemasyarakatan di Aula Semar Nawasena, Lantai III Kanwil Ditjenpas DIY, Kamis (8/10).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini diikuti oleh petugas pelayanan terpadu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Bimtek dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

Kepala Kanwil Ditjenpas DIY membuka kegiatan sekaligus memberikan sambutan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi petugas pelayanan agar mampu memberikan layanan secara profesional, ramah, cepat, tepat, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Kantor Wilayah Ditjenpas D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi petugas pelayanan terpadu UPT Pemasyarakatan se-DIY guna meningkatkan standar pelayanan yang ramah, cepat, tepat, transparan, dan berintegritas tanpa pungutan liar. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat sejalan dengan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Materi utama Bimtek berfokus pada pelayanan publik inklusif dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. Melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, serta akomodasi yang layak, petugas diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam tugas sehari-hari demi mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, setara, dan bermartabat.



89 WARGA BINAAN LAPAS YOGYAKARTA IKUTI WISUDA SANTRI





YOGYAKARTA - Kanwil Ditjenpas DIY terus mendorong penguatan pembinaan kepribadian bagi warga binaan melalui berbagai program pembinaan positif dan berkelanjutan.

Salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Wisuda Santri ke-15 Madrasah Al Quran Al Fajar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Kamis (8/10), yang berlangsung di Masjid Al Fajar Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Kegiatan tersebut menjadi momentum apresiasi atas kesungguhan warga binaan dalam mengikuti pembinaan keagamaan sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan karakter selama menjalani masa pidana. Sebanyak 89 santri mengikuti prosesi wisuda dengan capaian yang beragam, terdiri atas 15 santri tingkat Iqro', 43 santri tingkat Al-Qur'an, dan 31 santri kategori Hafiz.

Pada kategori Hafiz, capaian hafalan para santri juga menunjukkan hasil yang beragam. Sebanyak 15 santri berhasil menghafal 1 juz, 6 santri menghafal 2 juz, 3 santri menghafal 3 juz, 7 santri menghafal 4 juz, 1 santri menghafal 10 juz, serta 3 santri berhasil mencapai hafalan sebanyak 14 juz. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan keagamaan di lingkungan pemasyarakatan dapat menjadi ruang bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi diri sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual.

Wisuda Santri ke-15 Madrasah Al Quran Al Fajar dihadiri berbagai stakeholder, mulai dari BAZNAS DIY, Kemenag Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Lazismu, jajaran Kanwil Ditjenpas DIY, hingga pelaku usaha dan mitra. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen pembinaan warga binaan yang humanis dan berorientasi pada perubahan perilaku melalui penguatan nilai spiritual. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembinaan sekaligus membekali warga binaan agar mampu memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif di tengah masyaraka

KANWIL DITJENPAS DIY AMANKAN 569 NUP BARANG MILIK NEGARA DI EKS RUPBASAN KELAS II BANTUL









Bantul — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Tim Barang Milik Negara (BMN) bersama Kejaksaan Negeri Bantul melaksanakan kegiatan pengambilan BMN di Eks Rupbasan Kelas II Bantul pada Kamis (8/10/2026).

Dalam pelaksanaannya, Tim BMN Kanwil Ditjenpas DIY yang didampingi oleh Tim BMN Kejaksaan Negeri Bantul melakukan pengambilan sebanyak 569 NUP BMN, yang terdiri atas 1 unit mobil dengan kondisi rusak berat serta 568 peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan kesepakatan inventarisasi bersama.

Proses pengangkutan seluruh barang tersebut menggunakan sarana transportasi berupa truk angkutan barang, truk towing, dan mobil pickup. Seluruh rangkaian kegiatan pengambilan BMN di Eks Rupbasan Kelas II Bantul tersebut berjalan dengan lancar, tertib, serta sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi barang yang mayoritas mengalami rusak berat, pihak penyelenggara merekomendasikan agar seluruh BMN tersebut dapat diinventarisasi ulang dan diajukan pengusulan penghapusan BMN.

PASTIKAN LAYANAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, DITJENPAS TINJAU PELAYANAN PUBLIK RUTAN YOGYAKARTA



YOGYAKARTA – Jajaran Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan melaksanakan Verifikasi Lapangan Pelayanan Publik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta, Kamis (8/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta satuan kerja di bawahnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan verifikasi ini mengacu pada semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan penyelenggara negara dan badan publik untuk memberikan pelayanan berkualitas dan akuntabel kepada masyarakat. Hal tersebut juga menjadi landasan dalam menjamin kepastian hukum serta pemenuhan hak masyarakat atas informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam kegiatan tersebut, ti.m melakukan peninjauan terhadap sejumlah aspek pelayanan, di antaranya layanan pemberian hak integrasi bagi warga binaan pemasyarakatan serta pemenuhan hak-hak lainnya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan setiap layanan diberikan sesuai prosedur, berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan secara transparan dan tanpa pungutan liar.

Verifikasi lapangan ini juga menjadi sarana untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan di satuan kerja, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Dengan demikian, setiap layanan yang diberikan dapat semakin terukur, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak penerima layanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran Pemasyarakatan DIY terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik pungli. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan publik yang baik bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga menghadirkan kepastian, transparansi, dan keadilan bagi setiap penerima layanan. Dengan komitmen bersama, Pemasyarakatan DIY terus berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.



PASTIKAN INTEGRITAS LAYANAN, DITJENPAS EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA





YOGYAKARTA – Komitmen dalam mewujudkan birokrasi pemasyarakatan yang bersih dan akuntabel terus digelorakan. Kali ini, jajaran Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan turun langsung melakukan verifikasi lapangan standar pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta pada Kamis (8/10).

Agenda peninjauan ini merupakan bagian dari pengawasan berkala guna memastikan seluruh unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY konsisten menjalankan tugas sesuai aturan yang ditetapkan.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kegiatan ini menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan layanan yang prima, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat maupun warga binaan.

Dalam peninjauannya, tim berfokus mengevaluasi efektivitas layanan substantif, seperti proses pemberian hak integrasi bagi warga binaan. Setiap tahapan diperiksa secara teliti untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai standar operasional, taat hukum, serta steril dari segala bentuk praktik pungutan liar.

Kehadiran tim verifikasi di lapangan juga dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi dua arah. Tujuannya untuk memetakan aspek-aspek yang sudah berjalan dengan baik agar dapat dipertahankan, sekaligus mencatat ruang perbaikan guna mendongkrak kualitas pelayanan ke tingkat yang lebih optimal.

Melalui langkah proaktif ini, Pemasyarakatan DIY diharapkan semakin mantap dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas tinggi. Sebab, esensi dari pelayanan publik yang ideal bukan sekadar menuntaskan urusan administratif, melainkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta menjamin hak setiap individu secara adil dan transparan.

Hggggggggh

VERIFIKASI LAPANGAN PELAYANAN PUBLIK, DITJENPAS TINJAU KUALITAS LAYANAN DI LAPAS SLEMAN





SLEMAN – Jajaran Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan melaksanakan Verifikasi Lapangan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman, Kamis (8/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY berjalan sesuai ketentuan, serta mengedepankan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Verifikasi lapangan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut mengamanatkan penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel.

Tim melakukan peninjauan menyeluruh di Lapas Kelas IIB Sleman guna mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan agar sesuai standar, transparan, inklusif, serta akuntabel. Ruang lingkup peninjauan ini mencakup ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana termasuk fasilitas kunjungan dari pendaftaran, antrean, ruang tunggu, hingga toilet serta pemutakhiran maklumat pelayanan dan prosedur penyampaian informasi hak-hak warga binaan.

Selain itu, tim memeriksa mekanisme kompensasi pelayanan, kemudahan akses kanal pengaduan, ketersediaan fasilitas ramah disabilitas, sarana kesehatan dan dapur sehat, serta kelengkapan dokumen kerja sama pemangku kepentingan.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemasyarakatan DIY untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat, pemenuhan hak warga binaan secara profesional, serta pencegahan praktik pungutan liar. Dengan demikian, Pemasyarakatan DIY terus berupaya menghadirkan pelayanan yang transparan, inklusif, dan akuntabel bagi masyarakat.





TIM TEKFORMA DITJENPAS VERIFIKASI PELAYANAN PUBLIK DI LAPAS NARKOTIKA JOGJA DAN RUTAN BANTUL, HASILNYA DINILAI BAIK

SLEMAN – Direktorat Tekforma Ditjen Pemasyarakatan melaksanakan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemasyarakatan di dua satuan kerja di wilayah DIY, yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Rutan Kelas IIB Bantul, pada Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini didampingi oleh tim pelayanan publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan standar pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan telah terpenuhi dan dirasakan manfaatnya, baik oleh masyarakat pengguna layanan maupun warga binaan.

Di kedua lokasi, tim melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik, termasuk ketersediaan dan pembaruan Maklumat Pelayanan sebagai wujud komitmen petugas kepada masyarakat.

Pemeriksaan juga mencakup fasilitas layanan kunjungan, meliputi ruang pendaftaran, sistem antrean, ruang tunggu, kamar mandi, dan toilet, guna memastikan kenyamanan keluarga warga binaan yang berkunjung. Tim turut memeriksa ketersediaan informasi serta mekanisme pemberian kompensasi bagi pengguna layanan, dan ketersediaan kanal pengaduan beserta kemudahan aksesnya bagi masyarakat. Aspek inklusivitas menjadi perhatian melalui pengecekan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Secara umum, hasil verifikasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta maupun Rutan Kelas IIB Bantul telah berjalan dengan baik. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Melalui verifikasi ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah D.I. Yogyakarta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dan warga binaan memperoleh layanan yang prima, transparan, dan humanis.

PERKUAT SINERGI DIY, KAKANWIL DITJENPAS HADIRI COFFEE MORNING FORKOPIMDA



YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta menghadiri kegiatan Coffee Morning Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal pemerintah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (9/10). Kegiatan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antarpimpinan daerah serta instansi vertikal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui pertemuan informal tersebut, para pimpinan instansi diharapkan dapat mempererat komunikasi, membangun kesamaan pandangan, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Kehadiran Kepala Kanwil Ditjenpas DIY merupakan bentuk komitmen jajaran Pemasyarakatan dalam menjaga hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi dengan unsur Forkopimda serta instansi vertikal lainnya. Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang selaras dengan kebijakan pemerintah.

Melalui kegiatan Coffee Morning ini, diharapkan hubungan kerja sama antarlembaga semakin solid sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat khusunya DIY.





PASTIKAN KUALITAS DAN KESESUAIAN BAHAN DINAS, KARO UMUM KEMENIMIPAS TINJAU DISTRIBUSI DI KANWIL DITJENPAS DIY

YOGYAKARTA – Kepala Biro Umum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Agung Aribawa, meninjau langsung pendistribusian kain bahan pakaian dinas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kunjungan tersebut, Agung diterima dan didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas DIY, Kristiana Hambawani.

Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya Kemenimipas untuk memastikan proses pendistribusian kain bahan pakaian dinas berjalan dengan baik serta memastikan bahan yang diterima jajaran Kanwil Ditjenpas DIY sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Langkah ini menjadi bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan kedinasan sekaligus menjaga kualitas perlengkapan yang digunakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Selain memantau pendistribusian kain bahan pakaian dinas, Agung juga meninjau kondisi kantor Kanwil Ditjenpas DIY. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Ditjenpas DIY atas keberhasilan mengelola dan memanfaatkan bekas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) menjadi kantor yang nyaman dan mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

Pemanfaatan fasilitas yang ada secara optimal tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung efektivitas kerja, sekaligus menunjukkan komitmen jajaran Kanwil Ditjenpas DIY untuk menciptakan lingkungan kerja yang representatif tanpa mengesampingkan prinsip efisiensi dan optimalisasi aset.

Melalui kunjungan ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antara Kemenimipas dan Kanwil Ditjenpas DIY semakin kuat, baik dalam pemenuhan kebutuhan kedinasan maupun optimalisasi fasilitas kerja. Dengan dukungan sarana yang memadai dan pengelolaan yang tepat, jajaran Kanwil Ditjenpas DIY diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan serta menjalankan tugas pemasyarakatan secara profesional dan berintegritas.

KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

Yogyakarta, 9 Oktober 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY,

Muhammad Ali Syeh Banna



MUHAMMAD ALI SYEH BANNA
KAKANWIL DITJENPAS DIY